

RINGKASAN

Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan UAKKBUN-Kanwil DJPb Provinsi Bali, Sevira Destyfani, NIM D42220456, tahun 2025, 71 hlm., Akuntansi Sektor Publik, Politeknik Negeri Jember, Aloysius Prastowo Setyonugroho (Pembimbing Praktisi) dan Sugeng Hartanto.,S.E., M.Akun (Dosen Pembimbing Magang).

Politeknik Negeri Jember adalah perguruan tinggi yang mengusung Pendidikan berbasis vokasi yang mana mendedikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan melatih mahasiswa yang berkualitas serta memiliki kemampuan yang berkompeten di bidangnya. Oleh karena itu, perlu meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan pengalaman mahasiswa dan mempersiapkan diri memasuki dunia kerja yang sebenarnya. Keahlian dan keterampilan mahasiswa dapat berkembang melalui pendidikan di kampus, baik melalui buku maupun pengalaman kerja yang mereka peroleh. Pengalaman kerja merupakan keterampilan yang didapatkan melalui praktik langsung dilingkungan kerja profesional.

Kegiatan magang merupakan salah satu program yang tercantum dalam kurikulum Politeknik Negeri Jember sebagai salah satu persyaratan kelulusan bagi mahasiswa. Pelaksanaan magang dilakukan pada awal semester VII dengan jangka waktu 720 jam atau setara 4 bulan efektif, dimulai pada 01 September 2025 dan berakhir pada 31 Desember 2025. Kegiatan belajar di lapangan ini merupakan rangkaian pembelajaran di luar sistem belajar mengajar tatap muka di dalam kelas. Setelah memperoleh materi dan pengetahuan yang dipelajari dalam perkuliahan maka kegiatan magang ini merupakan proses pengaplikasian teori yang didapat dari perkuliahan pada keadaan yang sebenarnya yang ada di lapangan. Kegiatan magang ini dilaksanakan pada Kantor Wilayah DJPb Provinsi Bali. Pelaksanaan magang ditempatkan di Bidang Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan keuangan.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) adalah instansi vertikal Kementerian Keuangan di daerah yang bertanggung jawab langsung kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan, berdasarkan struktur organisasinya Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bali vii membawahi 3 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) sebagai unit pelaksana teknis di daerah. Dalam regulasi tugas, pokok, dan fungsi yaitu PMK No.262/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaannya, bidang PAPPK menjalankan tugas pokoknya yaitu Penyusunan Laporan Keuangan Unit Akuntansi Koordinator Kuasa Bendahara Umum Negara (LK UAKKBUN-Kanwil) secara rutin tiap bulannya.

Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan uakkbun kanwil guna melihat pengelolaan Apbn di wilayah kanwil apakah berjalan dengan lancar dan sesuai di setiap datanya, penyusunan laporan keuangan uakkbun ini tidak hanya sekedar memindahkan angka, tetapi melibatkan proses rekonsiliasi dan analisis mendalam. Prosedur seperti monitoring melalui Monsakti dan verifikasi draft laporan Kppn bertujuan untuk memastikan data "bersih" dari kesalahan manusia (human error), pagu minus, atau transaksi gantung yang dapat merusak kualitas laporan. Pada hasil akhir penyusunan laporan keuangan tersebut ditemukan adanya kendala terkait selisih data sehingga harus mengkonfirmasi ke pihak kppn untuk segera ditindaklanjuti.